

Hari-hari Terakhir Sebuah Rezim

Judul: Pers dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni;
Editor: Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi, Ishadi S.K.;
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
Tahun terbit: 2000; *Tebal:* xii + 465 halaman;
Harga Rp 45.000.

Tampaknya, menarik untuk menengok kembali pelbagai peristiwa dalam hari-hari terakhir sebuah rezim. Beberapa minggu terakhir menjelang kejatuhan Soeharto, liputan pers dalam dan luar negeri memang sangat menyita perhatian publik; bukan saja karena liputannya kian berani, tajam, dan objektif-komprehensif, namun apa yang tengah diberitakan memang mengundang rasa penasaran: bisakah Soeharto terus bertahan setelah selama 32 tahun berkuasa?

Minggu-minggu sebelum kejatuhan Soeharto banyak disebut-sebut sebagai “minggu-minggu penuh ralat” (Putra, 2000). *Pertama*, keterangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Pembangunan VII, Hartono, dan Menteri Penerangan (Menpen), Alwi Dahlan, se usai menemui Soeharto, Jumat, 1 Mei 1998, mengatakan bahwa menurut Presiden, reformasi baru bisa dilakukan setelah 2003, dan “kalau tidak mau mengerti juga, akan dihadapi dengan tindakan” (*Republika*, 2 Mei 1998). Protes terjadi di mana-mana dan malah makin menyulut aksi demo. Hari Sabtu itu juga, Mendagri dan Menpen dipanggil Presiden untuk meralat kembali pernyataan itu. Menurut Menpen, “Tidak benar Presiden tidak menyetujui reformasi dan tidak ingin reformasi hingga 2003. Reformasi bisa dimulai dari sekarang” (*Republika*, 3 Mei 1998).

Kedua, soal *statement* Soeharto hari Rabu, 13 Mei 1998, di Kairo bahwa dia bersedia

mengundurkan diri dengan menyatakan, “Kalau saya tidak dipercaya lagi, silakan. Karena saya sudah mengatakan sejak dahulu, kalau sudah tak diberi kepercayaan, saya tak akan mempertahankannya dengan senjata” (*Republika*, 14 Mei 1998). Hari Kamis itu juga, melalui Menpen Alwi Dahlan, Presiden Soeharto menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengatakan siap mengundurkan diri seperti yang dikutip media massa, demikian dilaporkan kantor berita *Antara* (Singgalang, 16 Mei 1998, dalam Putra, 2000).

Begitulah, yang segera terbayang ketika membaca judul buku ini adalah sebuah momen penting dan bersejarah, *the waiting game is over*—penantian panjang itu telah berakhir: penantian oleh siapa saja, termasuk pers, setelah sekian lama dipasung dan dipaksa menerima segala sesuatu yang serba tunggal, sentralistik, dan monopolistik.

Namun, seperti ditulis tim editor buku ini—Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi S.K.—pelbagai proses politik dan ekonomi yang berlangsung menjelang *lengser*-nya Soeharto, Mei 1998, telah memunculkan dinamika politik ke arah yang hampir sepenuhnya di luar prediksi dan proyeksi para pakar sebelumnya. Dinamika politik waktu itu juga telah diwarnai oleh perubahan karakter pers yang tidak terduga sebelumnya. Pers, tepatnya *mainstreams media*, yang semula demikian hati-hati di



bawah kontrol ketat penguasa, menjadi sedemikian bebas, lugas, dan berani. Perubahan karakter itu juga terjadi pada stasiun televisi swasta yang dikuasai oleh modal keluarga Cendana beserta para kroni mereka (seperti SCTV, RCTI) dan berangsur-angsur menjangkiti media milik pemerintah (khususnya TVRI). Tidak terlalu berlebihan bila seorang jurnalis asing menulis masa menelang Mei 1998 tersebut sebagai “*a fascinating chapter in Indonesia’s media history*”, di mana pers waktu itu dinilainya berhasil menggerogoti legitimasi Soeharto melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan (hlm. 9).

Pers era Orde Baru yang lebih dikenal sebagai bagian dari *ideological state apparatus*, yang sangat berhati-hati, santun di hadapan penguasa, dan tekun menjalankan swasensor. Namun, menjelang “Revolusi Mei 1998,” produk industri pers tiba-tiba berubah dramatis: penuh informasi yang “menyala,” lugas, dan sarat dengan analisis serta deskripsi yang mampu mengikis legitimasi rezim represif Orde Baru.

Kamis itu, 21 Mei 1998, sebetulnya adalah hari libur nasional (hari kenaikan Isa Almasih). Tetapi, beberapa harian utama Indonesia, tetap terbit—sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Situasi terakhir di Tanah Air, terutama menyangkut Presiden Soeharto, memang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia.

Dalam edisi khususnya hari itu, *Kompas* menampilkan *headline* “Selamat Datang Pemerintahan Baru”. *Media Indonesia* menurunkan berita “FKP Minta Sidang Istimewa: Mahasiswa Desak Tanggal 9 Juni, Amien Rais Bantah Diterima Pak Harto”. Sementara, *Republika* memuat laporan utama “Sultan pimpin Reformasi Damai di Yogya: ‘Rakyat tak Butuh Kompromi Politik’,” plus berita “Hasil Lobi Pimpinan DPR dan Mahasiswa: Pengunduran Diri Presiden Ditunggu Besok”.

Hari itu, pukul 09.00, Presiden Soeharto keluar dari ruang Jepara dan mengumumkan, “...sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-

sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998...” (lihat Ecip, 1998).

Harus diakui memang, tanpa media massa, tanpa pers, revolusi Mei 1998 yang menegangkan, belum tentu akan bermuara pada berhentinya Presiden Soeharto.

Buku *Pers dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama ini, mencoba melacak perubahan “industri pers” secara lebih holistik, dengan menempatkan pers sebagai institusi kapitalis yang penuh kontradiksi internal dalam suatu jalinan perubahan pada jenjang *mikro* (teks isi media), *meso* (dinamika proses-proses memproduksi dan mengkonsumsi teks media), dan *makro* (dinamika struktur sosial dan budaya dalam konteks kesejarahan yang spesifik).

Buku setebal 465 halaman yang berisi 22 tulisan para pakar ilmu komunikasi, ekonomi, sosiologi, dan politik ini boleh dibilang merupakan studi tentang media massa ketika terjadi perubahan politik pada bulan Mei 1998 di Indonesia, yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto. Memang, masih banyak persoalan yang belum bisa dijawab tentang peristiwa Mei 1998 itu. Mengapa, misalnya, bisa secara cepat terjadi penggabungan kekuatan mahasiswa dan kekuatan rakyat? Mengapa para pengikut setia Soeharto dari kalangan Golkar dan ABRI tiba-tiba juga meminta sang presiden untuk mundur?

Barangkali, seperti dikatakan Arief Budiman—Aktivis 66, Direktur Program Studi Indonesia, Melbourne University, Australia—dalam komentarnya terhadap buku ini, dengan melakukan penelitian pada media massa ketika itu, bagaimana media massa mempresentasikan realitas, kita bisa lebih memahami mengapa perubahan politik ini bisa terjadi. Menurut Arief, apa yang disebut sebagai realitas di dunia modern sekarang ini, praktis “dibuat” oleh media massa. Dan tingkah laku manusia, termasuk keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi individu, bangsa, dan umat

manusia, ditentukan oleh realitas yang dipersepsikan ini. Karena itu, tak perlu disebutkan lagi bahwa dalam dunia modern, peran media massa sangat menentukan.

“Setiap orang yang mengharapkan reformasi, demokrasi, dan keadilan,” kata Daniel S. Lev, “terpaksa memikirkan peranan dan pengaruh pers, radio, dan televisi. Sumber informasi, ide, kritik, dan pertukaran pandangan media itu bisa saja dipakai sebagai alat kontrol atas masyarakat atau, sebaliknya, merupakan *sine qua non* suatu masyarakat yang cukup cerdas dan berpengalaman untuk menilai kelakuan elite politik, para pejabat negara, dan keputusan yang mereka jalankan.” Tetapi, lanjut Lev, justru karena begitu penting dalam kehidupan masyarakat, media komunikasi sendiri perlu dinilai, dihadapkan pada kekurangannya, dan ditantang terus. Tugas itulah, menurut guru besar politik University of Washington, USA, yang juga pengamat Indonesia itu, yang menonjol dalam kumpulan tulisan dalam buku ini—suatu sumbangan yang perlu diperhatikan oleh para reformis.

Bagian pertama buku ini pada intinya berupaya memberi gambaran seputar kompleksitas dinamika ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang secara spesifik ditemui di Tanah Air menjelang atau selama “Revolusi Mei 1998”. Bagian kedua, berisi serangkaian tulisan yang, sebagai suatu kesatuan, berusaha menggambarkan dinamika proses-proses memproduksi dan mengonsumsi teks isi media, baik dinamika pada jenjang industri maupun organisasi. Bagian ketiga merupakan usaha untuk sedikit menggambarkan teks isi media, tepatnya *mainstream media*, yang dijumpai pada masa menjelang Soeharto *lengser*, Mei 1998. Tulisan-tulisan pada bagian ini didasarkan pada analisis teks isi media cetak dan televisi.

Hal yang menarik dari buku ini terutama adalah pandangan seorang Indonesianis, Jeffrey Winters, mengenai “Dampak Politis dari Sumber dan Teknologi Informasi Baru di Indonesia” dan “Catatan Media Australia mengenai Jatuhnya Sebuah Tirani” yang ditulis Andrew Jakubowicz dan Rod Palmer.

Winters memfokuskan pembahasannya pada

lonjakan peliputan media internasional di Indonesia dan peranan internet sebagai dua faktor penting dalam perkembangan situasi politik negara ini di penghujung masa Orde Baru. Argumentasi utama dalam uraian yang ditulis pengajar pada Departemen Politik, Northwestern University ini adalah bahwa liputan media internasional terhadap Indonesia dan internet, memiliki dampak primer di tingkat elite politik, sementara efeknya terhadap masyarakat luas sangat dipengaruhi oleh kaum elite dan media massa lokal. Internet, dalam pandangan penulis buku—beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti *Dosa-dosa Politik Orde Baru* (1999) dan *Power in Motion: Modal Bepindah Modal Berkuasa* (1999)—tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai alat untuk melakukan kegiatan aktivisme dan koordinasi di antara kelompok oposisi yang semakin tidak puas (terhadap rezim Soeharto). Luapan peliputan media internasional terhadap Indonesia—yang umumnya bersifat sangat kritis—juga membangkitkan ketidakpuasan di kalangan elite. Kalangan tersebut ‘terganggu’ dengan penggambaran Indonesia sebagai suatu kediktatoran militer yang terbelakang secara politis, di saat negara berkembang lainnya di berbagai pelosok di dunia, termasuk beberapa negara ASEAN, telah berhasil menjalani transisi menuju demokrasi (hlm. 259-260).

Sementara itu, Andrew Jakubowicz, guru besar Ilmu sosiologi University of Technology Sydney—pernah mengajar tentang Australia di Jakarta pada Juni 1997—dan Rod Palmer—menyelesaikan tesisnya di bidang Humanities and Social Science di University of Technology Sydney (1999), menggambarkan, dalam tiga tahun sejak akhir 1996 hingga akhir 1999, Indonesia masuk dalam kesadaran publik Australia lewat serangkaian citra yang ekstrem. Saat Pemerintahan Nasional Liberal berkuasa di Canberra pada Maret 1996, opini elite politik Indonesianlah yang memantulkan keprihatinan Asia atas kekalahan Perdana Menteri (PM) Keating, dan atas kembalinya era kolonial, yang diwakili oleh Howard, sang PM baru. Media di Indonesia menyuarakan

keprihatinan terhadap rezim ini dan bangkitnya Hansonisme sepanjang 1996.

Pada 1997, ujar Jakubowicz dan Palmer, Indonesia jadi pusat perhatian lagi, setelah menjadi salah satu macam ekonomi yang jatuh tak tertahan. Kondisi ekonominya disorot sebagai bangunan besar yang didirikan di atas korupsi, manipulasi, dan kronisme. Tepat pada saat Australia disebut Howard (bertolak belakang dengan visi Keating) sebagai bukan sungguh-sungguh bagian dari Asia, bagian-bagian dari Asia mulai berjatuhan, terus merosot serupa negara-negara Selatan, dan struktur sosialnya kacau balau. Indonesia pun menjadi contoh bagi politisi konservatif dengan fokus eropasentris mereka, dan bagi populis kanan dengan paham chauvinisme mereka, atas bahaya yang akan mengancam bila Australia mengikat diri dengan Asia. Kondisi ini memberi gambaran pada mereka tentang perbedaan mendasar antara Australia dan Indonesia, antara Barat dan Timur (hlm.

337-338).

Sekilas, karena kajian ini mengaitkan berbagai jenjang analisis, tampak sebagai sebuah kajian holistik. Namun, seperti diakui para editornya, sebuah kajian holistik memang belum tentu komprehensif. Banyak dimensi penting yang terlewatkan. Proses-proses produksi dan konsumsi teks, misalnya, perlu didasarkan pada penelitian empirik mengenai pengaruh pemberitaan media pada masa itu, baik mengenai publik secara luas maupun mengenai kalangan elite.

Tetapi, kekurangan-kekurangan demikian tidaklah mengurangi bobot serta nilai *Pers dalam "Revolusi Mei"* ini. Buku yang digarap cukup apik ini sangat berguna bagi setiap orang yang ingin menambah luas cakrawala hidupnya—baik dia seorang mahasiswa, dosen, wartawan, pustakawan, politisi, ekonom, maupun militer, dan siapa saja. **(Alex Sobur) ①**